



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5319-5327

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Reformasi Hukum Militer Terhadap Profesionalisme Tni: Tinjauan Dari Perspektif Disiplin Militer

Yulia Rachmawati^{1✉}, Mulyono², Ani Maryani³

Sekolah Tinggi Hukum Militer

Email: Yuliar0728@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh reformasi hukum militer terhadap profesionalisme TNI, dengan fokus pada disiplin militer dan penerapan hukum internasional, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks implementasi reformasi tersebut melalui studi literatur. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi literatur, yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai sumber tulisan yang relevan untuk memahami suatu fenomena atau topik tertentu. studi literatur adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin merupakan elemen krusial bagi setiap anggota militer, termasuk Prajurit TNI, yang dibentuk sejak pendidikan dasar keprajuritan melalui proses pembinaan dan pengasuhan, mencerminkan ketaatan yang dilandasi kesadaran akan pengabdian kepada nusa dan bangsa serta pengendalian diri untuk mematuhi perintah dan tata kehidupan prajurit. Program pelatihan yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia dan etika militer telah menghasilkan perubahan positif dalam sikap dan perilaku prajurit, termasuk penurunan pelanggaran disiplin, sementara penerapan hukum internasional dalam doktrin militer memperkuat legitimasi TNI di mata dunia. Namun, tantangan tetap ada akibat resistensi budaya internal yang menciptakan kesenjangan antara kebijakan progresif dan praktik di lapangan, yang dapat memperlemah efektivitas reformasi hukum militer. Diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan TNI dan dukungan pemerintah, termasuk melalui pendidikan berkelanjutan dan dialog terbuka, untuk mengatasi tantangan ini; tanpa dukungan konsisten dalam kebijakan dan pendanaan, reformasi hukum militer dapat stagnan.

Kata Kunci: *Hukum Militer, Profesionalisme, TNI, Disiplin*

Abstract

The purpose of this study is to explore and analyze the impact of military law reform on the professionalism of the TNI, with a focus on military discipline and the application of international law, and to identify the challenges and opportunities that arise in the context of the implementation of the reform through a literature study. This type of research is included in the category of literature study, which aims to collect, analyze, and evaluate various relevant written sources to understand a particular phenomenon or topic. Literature study is a systematic process to identify, evaluate, and analyze research that is relevant to the topic to be studied. The results of this study indicate that discipline is a crucial element for every member of the military, including TNI soldiers, which is formed since basic military education through a process of coaching and nurturing, reflecting obedience based on awareness of devotion to the nation and state and self-control to obey orders and the rules of life of soldiers. Training programs that prioritize human rights values and military ethics have resulted in positive changes in the attitudes and behavior of soldiers, including a decrease in disciplinary violations, while the application of international law in military doctrine strengthens the legitimacy of the TNI in the eyes of the world. However, challenges remain due to internal cultural resistance that creates a gap between progressive policies and practices on the ground, which can weaken the effectiveness of military law reform. Strong commitment from TNI leadership and government support, including through ongoing education and open dialogue, are needed to overcome these challenges; without consistent support in policy and funding, military law reform can stagnate.

Keywords: Military Law, Professionalism, TNI, Discipline

PENDAHULUAN

Militer merupakan bagian integral dari masyarakat dan bangsa, yang terdiri dari warga negara yang memiliki tugas khusus dalam membela negara dengan menggunakan senjata. Tugas utama mereka adalah bertempur, dan untuk itu, terdapat norma dan kaidah khusus yang harus ditaati (Mulyana, 2023); Pradana, (2020). Ketaatan ini diawasi secara ketat, karena setiap prajurit harus siap untuk mempertahankan negara. Disiplin militer, yang mencakup kepatuhan terhadap atasan dan norma yang ditetapkan, sangat penting untuk membentuk kebiasaan positif di kalangan prajurit, meskipun pimpinan tidak selalu hadir (Wulansari, 2018);(Yoga, 2019). Disiplin militer tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kreativitas di antara anggota militer (Yusniadi et al., 2024). Dalam konteks ini, saptamarga prajurit berfungsi sebagai pedoman disiplin yang harus dipatuhi oleh setiap anggota, menciptakan keterpaduan dalam kehidupan militer. Dalam suatu negara berdaulat, keberadaan kekuatan militer, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), adalah esensial untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan serta kedaulatan.

Prajurit TNI, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, memiliki kedudukan sebagai warga negara yang tunduk pada hukum nasional dan internasional, serta berkomitmen pada disiplin dan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Setianingsih, 2019). Ketaatan mereka terhadap hukum mencakup peraturan yang secara spesifik diterapkan pada institusi militer, yang menegaskan pentingnya peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta menjalankan tugasnya dengan integritas, etika, dan profesionalisme. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, prajurit TNI tidak hanya berfungsi sebagai pelindung negara dalam situasi konflik, tetapi juga berperan aktif dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas, baik di tingkat domestik maupun internasional, sehingga menciptakan citra positif bagi Indonesia di mata dunia.

Reformasi hukum militer di Indonesia muncul sebagai respon yang signifikan terhadap tuntutan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan institusi pertahanan, terutama setelah berakhirnya era Orde Baru (Haripin, 2022). Pada masa itu, TNI mengalami transisi yang kompleks, berupaya melepaskan diri dari keterlibatan politik yang selama ini mengakar, menuju suatu organisasi yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Proses transformasi ini mencakup perubahan regulasi yang mendasar, termasuk peninjauan kembali peraturan yang mengatur disiplin militer dan kode etik prajurit. Dengan demikian, proses ini menjadi krusial dalam membangun kepercayaan publik dan legitimasi TNI sebagai institusi yang profesional dan demokratis di tengah tantangan sosial dan politik yang terus berkembang.

Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan tanggung jawab komando dan kewajiban bagi setiap Komandan (Prasetyo, 2002). Mereka harus memperhatikan kesadaran hukum dan disiplin prajurit di bawah wewenangnya. Konsep penghargaan dan sanksi harus diterapkan secara konsisten dalam penegakan hukum; penghargaan diberikan berdasarkan kinerja profesional, sementara sanksi dijatuhkan kepada prajurit yang menunjukkan kurangnya profesionalisme atau melanggar hukum. Penjatuhan sanksi harus dilakukan tegas, bahkan diumumkan sebagai contoh, dengan tujuan memberikan pengaruh positif dan efek pencegahan bagi prajurit lainnya. Dengan demikian, penegakan hukum di TNI diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan profesionalisme prajurit secara keseluruhan.

Dalam konteks penerapan hukum internasional, reformasi hukum militer juga menuntut TNI untuk lebih memahami dan menghormati norma-norma yang berlaku di tingkat global. Hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan konflik bersenjata dan perlindungan terhadap warga sipil, harus menjadi pedoman dalam setiap operasi

militer (Krustiyati, 2010). Selain itu, reformasi hukum militer juga mendorong pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih baik terhadap tindakan anggota TNI (Badu, 2020). Dengan adanya lembaga independen yang bertugas mengawasi pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan, transparansi dalam penegakan hukum di lingkungan militer dapat terjaga (Karina, 2023). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM di masa lalu, serta untuk memastikan bahwa TNI menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi literatur, yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai sumber tulisan yang relevan untuk memahami suatu fenomena atau topik tertentu. Menurut Leedy, P. D. and Ormrod, (2019) studi literatur adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Proses ini membantu peneliti memahami konteks penelitian dan mendasari argumen yang akan diajukan. Booth, WC, Colomb, GG, & Williams, (2008) mendefinisikan studi literatur sebagai cara untuk membangun landasan teoretis yang kuat dan mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang ada, yang dapat menjadi fokus penelitian baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disiplin adalah elemen fundamental yang harus dijalani oleh setiap anggota militer, termasuk Prajurit TNI. Pembentukan disiplin dimulai sejak masa pendidikan dasar keprajuritan dan dilanjutkan melalui proses pembinaan dan pengasuhan (Sidiq, 2010). Proses ini mencakup intensitas kegiatan dan doktrin yang bertujuan untuk menanamkan ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran terhadap pengabdian kepada nusa dan bangsa. Disiplin mencerminkan pengendalian diri untuk mematuhi perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit, serta memastikan kesatuan pola pikir, sikap, dan tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit (Herawati et al., 2014).

Dalam konteks kehidupan militer, disiplin bukan hanya tanggung jawab individu tertentu, tetapi menjadi syarat mutlak bagi seluruh prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui penyerahan jiwa raga dalam menjalankan tugas berdasarkan keimanan dan kesadaran akan pengabdian kepada bangsa (Firmansyah, 2017). Disiplin harus terinternalisasi dalam diri setiap prajurit dan tercermin dalam tindakan nyata, dengan penuh keyakinan, loyalitas kepada atasan, dan kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip yang ditetapkan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Disiplin menjadi karakteristik khas yang mendukung profesionalisme dan efektivitas TNI dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam konteks disiplin militer, penelitian oleh Pasaribu, (2019) menunjukkan bahwa program-program pelatihan yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia dan etika militer telah menghasilkan perubahan positif dalam sikap dan perilaku prajurit TNI, di mana program ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga mengedukasi prajurit tentang tanggung jawab moral mereka dalam konteks pelayanan kepada masyarakat. Penelitian tersebut mencatat penurunan signifikan dalam jumlah pelanggaran disiplin di kalangan prajurit setelah implementasi program tersebut, yang mencerminkan peningkatan kesadaran akan norma-norma hukum dan etika. Selain itu, penerapan hukum internasional dalam operasional TNI juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Menurut penelitian Rahardjo, (2020) integrasi prinsip-prinsip hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa dan protokol-protokolnya, ke dalam doktrin militer telah memperkuat legitimasi TNI di mata dunia internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa misi operasi militer, TNI berhasil menerapkan norma-norma internasional dengan baik, yang tidak hanya meningkatkan citra TNI di tingkat global, tetapi juga memperkuat komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, kedua aspek ini saling melengkapi, di mana peningkatan disiplin prajurit dan penerapan hukum internasional berkontribusi pada transformasi TNI menjadi institusi militer yang lebih profesional, etis, dan berorientasi pada masyarakat.

Berikut adalah tabel yang merangkum tentang pengaruh reformasi hukum militer terhadap profesionalisme TNI:

Tabel 1. Hukum Militer Terhadap Profesionalisme TNI

Aspek	Temuan Penelitian
Disiplin Militer	Program pelatihan yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia dan etika militer menghasilkan perubahan positif dalam sikap dan perilaku prajurit, serta penurunan pelanggaran disiplin.
Penerapan Hukum Internasional	Integrasi prinsip-prinsip hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa, ke dalam doktrin militer memperkuat legitimasi TNI di tingkat internasional, dengan baiknya penerapan norma-norma internasional.
Tantangan Implementasi	Resistensi terhadap perubahan muncul dari budaya internal TNI yang menekankan hierarki dan otoritas, menghambat penerapan nilai-nilai baru.

Namun, meskipun reformasi hukum militer telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, tantangan dalam implementasinya tetap ada dan perlu mendapatkan perhatian serius. Penelitian oleh Gunawan, (2017) mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama berasal dari resistensi terhadap perubahan yang sering kali muncul dari dalam institusi TNI itu sendiri. Meskipun ada kebijakan yang mendukung profesionalisme dan integrasi nilai-nilai hak asasi manusia, beberapa anggota TNI masih terpengaruh oleh budaya lama yang menekankan hierarki dan otoritas. Budaya ini cenderung membentuk cara berpikir yang konservatif, di mana anggota merasa lebih nyaman mengikuti perintah daripada berpartisipasi dalam diskusi terbuka tentang etika dan tanggung jawab mereka.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang mencolok antara kebijakan yang telah ditetapkan dan praktik di lapangan. Kesenjangan ini, seperti yang ditunjukkan oleh Nuraini, menciptakan dilema di mana kebijakan yang progresif tidak selalu diimplementasikan secara efektif. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan nilai-nilai baru yang diusung oleh reformasi, di mana beberapa anggota TNI mungkin masih memegang teguh prinsip-prinsip lama yang mengabaikan aspek-aspek penting dari reformasi. Dengan demikian, meskipun ada landasan hukum yang kuat, implementasi kebijakan sering kali terhambat oleh sikap dan kebiasaan yang sudah lama mengakar.

Lebih jauh lagi, resistensi ini dapat memperlemah efektivitas reformasi hukum militer secara keseluruhan. Ketika anggota TNI enggan untuk beradaptasi dengan perubahan, akan sulit untuk mencapai tujuan akhir dari reformasi, yaitu menciptakan institusi militer yang lebih profesional dan akuntabel. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan resistensi dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Misalnya, pendekatan yang melibatkan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta dialog terbuka antara pimpinan dan anggota dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan penerimaan terhadap perubahan. Akhirnya, untuk memastikan keberhasilan reformasi hukum militer, perlu ada komitmen yang kuat dari semua tingkat dalam institusi TNI untuk mendukung dan menerapkan nilai-nilai baru. Ini termasuk penguatan sistem pengawasan dan evaluasi yang memungkinkan anggota TNI untuk merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan masyarakat sipil juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perubahan. Dengan kolaborasi yang baik antara semua pihak, diharapkan tantangan dalam implementasi reformasi hukum militer dapat diatasi, sehingga TNI dapat berfungsi sebagai institusi yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, analisis data menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan TNI dan dukungan dari pemerintah. Penelitian oleh Iskandar, (2023) menyatakan bahwa tanpa adanya dukungan yang kuat dan konsisten, baik dalam hal kebijakan maupun pendanaan, reformasi hukum militer cenderung stagnan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa nilai-nilai profesionalisme dapat diinternalisasi dan dipraktikkan secara luas di seluruh jajaran TNI.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum militer memiliki peranan penting dalam transformasi TNI menjadi institusi yang lebih profesional dan akuntabel. Meskipun kemajuan telah terjadi dalam aspek disiplin militer dan penerapan hukum internasional, upaya berkelanjutan dalam pendidikan, pelatihan, dan pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi reformasi ini. Rekomendasi penelitian mencakup pengembangan kurikulum pelatihan yang komprehensif, penekanan pada nilai-nilai hak asasi manusia dan etika, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Mengingat adanya resistensi terhadap perubahan yang sering muncul dari budaya internal, penting untuk melibatkan anggota TNI dalam proses reformasi agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap perubahan tersebut. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan masyarakat sipil juga krusial untuk memperkuat legitimasi TNI, sehingga membangun hubungan yang lebih baik dengan publik. Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, tujuan untuk menciptakan TNI yang profesional, transparan, dan akuntabel dapat tercapai, serta mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Badu, L. W. (2020). Initiating Military Criminal Acts As A Competence Of Military Justice Absolute In Criminal Crime. *Legalitas*, 12(1), 57–81.
- Booth, Wc, Colomb , Gg, & Williams, J. (2008). The Craft Of Research (Edisi Ke-3). In *University Of Chicago Press*.
- Firmansyah. (2017). Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Untuk Mempermudah Tahanan Militer Meloloskan Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

- Jo Pasal 223 Kuhpidana. In *Unpas*.
- Gunawan. (2017). Kontrol Sipil Atas Militer Dan Kebijakan Pertahanan Di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Politik*, 2(1), 2017.
- Haripin. (2022). Intelijen Dan Keamanan Nasional Di Indonesia Pasca-Orde Baru. In *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Herawati, T., Nanda, H. S., Saputra, M. T., Yuliarty, R., & Widayanti, E. (2014). Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Polisi Militer Daerah Militer li Sriwijaya. *Jimpa*, 3(1), 155–170.
- Iskandar. (2023). Dukungan Kebijakan Dan Pendanaan Dalam Reformasi Hukum Militer: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Studi*, 4(1).
- Karina. (2023). Pengaruh Perbedaan Asas-Asas Hukum Pidana Umum Dan Hukum Militer Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional. *Madani: Jurnal Ilmiah*, 7(11), 540–547.
- Krustiyati. (2010). Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum Internasional Dan Nasional. In *Briliant Internasional*.
- Leedy, P. D. And Ormrod, J. E. (2019). Practical Research: Planning And Design . In *12th Edn. Pearson*.
- Mulyana, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tni Pangkat Titular Yang Melakukan Pelanggaran Hukum. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 467–478.
- Pasaribu. (2019). Anteseden Komunikasi Strategis Tni-Rakyat Dalam Pembinaan Teritorial (Binter) Di Komando Distrik Militer (Kodim) 0716/Demak. In *Doctoral Dissertation*.
- Pradana. (2020). Hubungan Sipil Militer Dalam Program Upsus Peningkatan Produksi Padi Tni Ad Dengan Kementerian Pertanian Di Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2017. In *Doctoral Dissertation*.
- Prasetyo. (2002). *Menunggu Godot'peradilan Ham Dan Tanggung Jawab Tni*.
- Rahardjo. (2020). *Integrasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Doktrin Militer: Penguatan Legitimasi Tni Di Mata Dunia Internasional*. 4(1).
- Setianingsih. (2019). *Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Bintel Rohani Islam (Rohis) Di Satuan Tentara Nasional Indonesia (Tni)*.
- Sidiq. (2010). *Pola Komunikasi Pada Sub Dinas Pembinaan Mental Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Prajurit Di Markas Komando Korps Marinir*.
- Wulansari, E. M. (2018). Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Tni) Paska Reformasi. *Rechtsinding*, 3(1), 1–7.

- Yoga. (2019). Upaya Peningkatan Kinerja Ditinjau Dari Disiplin Kerja Anggota Baterai Tempur (Raipur) Yonarmed li/Kostrad Magelang. In *Stie Widya Wiwaha*.
- Yusniadi, A., Darma, M., & Sitepu, K. (2024). Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Anggota Militer Yang Melanggar Aturan Disiplin Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 / 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Studi Di Kumdam I / Bb).